


PK 4

 PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima	23 APR 2010
Inventarisasi	: 4362 / FH / HD - 41 / 2010.
Klasifikasi	: 343.04 / Sri / 10
Subyek	: Tax e law

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLIKASI KETIDAK SINKRONAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 63 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2007 TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPnBM
DI PULAU BATAM**



Disusun oleh :

SRI AYU DHARMAWATI

N P M : 05 05 9042

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan, Pemerintahan dan Hubungan
Internasional

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2008**



HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLIKASI KETIDAK SINKRONAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 63 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2007 TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPnBM
DI PULAU BATAM**

Diajukan oleh :

SRI AYU DHARMAWATI

N P M : 05 05 9042
Program Studi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Kenegaraan, Pemerintahan dan
Hubungan Internasional

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 November 2008

Dosen Pembimbing,



Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 13 Desember 2008
Tempat : Ruang Dosen Lantai II, Ruang Bapak Junirahardjo, SH
 Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Junirahardjo, SH
Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, SH., M. Hum
Anggota : Sumyar, SH.,M.Hum

Tanda Tangan

.....

Mengesahkan
 Dekan Falkutas Hukum
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta



B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

MAITREYA PENUNTUN HIDUP Ku

*Maha Kaya Maitreya...
 Bimbing kami Hidup Penuh Syukur
 Leluasa Maitreya..
 Bersama Mu... kami Leluasa
 Sungguh Bebas Maitreya...
 Tuntun kami Capai Kebebasan
 Maha Agung Maitreya..
 Karna Engkau...
 Kami Hidup Mulia.*

*Suci Hening Maitreya... Bimbing kami Hidup Suci Hening
 Wajar Alami Maitreya... Tuntun kami Satu dengan Alam
 Lapang Dada Maitreya... Bimbing kami Slalu Memaafkan
 Maha Tegar Maitreya... Jauhkan kami dari Ketakutan*

*Tiada Tara Maitreya...
 Bersama Mu..
 Kami Hidup Tiada Tara
 Dharma Agung Maitreya...
 Bawa kami Hidup Tenram Damai
 Maha Sunya Maitreya...
 Bebaskan kami dari Semua Belenggu
 Maha Kasih Maitreya.....
 Tuntun kami tuk Menuju Bumi Suci Mu...*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman ini saya persembahkan kepada :

**TUHAN YANG MAHA ESA
BUDDHA MAITREYA**

dan

**Papa tercinta (Soelaiman)
Mama tersayang (Henny Purwanti)**

serta

**Cece terkasih (Sri Dewi Amalia S.Psi)
Titi terkasih (Jaya Kusuma Atmaja)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buddha Maitreya atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini yang dikenal dengan sebutan skripsi. Judul yang diangkat oleh penulis adalah **IMPLIKASI KETIDAK SINKRONAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007 TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPnBM DI PULAU BATAM**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (strata-1), program studi ilmu hukum dengan program kekhususan hukum kenegaraan dan hubungan internasional di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya bila tidak ada sumbangsih pemikiran, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati yang terdalam mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak B.Hestu Cipto Handoyo,SH.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Y.Sri Pudyatmoko,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, dengan penuh kesabaran telah meluangkan banyak waktu serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Mama tersayang dan Papa tercinta yang sejak dalam kandungan sampai perjalanan menempuh gelar Sarjana Hukum telah memberikan cinta dan perhatian yang begitu mendalam, tidak luput dari bimbingan, dukungan moral, nasehat dan pemaafan.
4. Bapak FX Endro SusiloH.LL.M selaku dosen pembimbing semester selama 3,5 tahun yang telah memberikan perhatian dan saran-saran akademik.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi perhatian, bimbingan, didikan baik akademik maupun moral selama penulis menjadi mahasiswa UAJY.
6. Pandita Huang, Pandita Wang, Pandita Xie, Pandita Qi dan Pandita Zheng yang telah memberikan pendidikan moral.
7. Cece dan Titi yang selalu memberikan dukungan dan menemani di saat suka maupun duka.
8. Sila, Yenny hosen, Dewi Kawe, Andi dan Ahiong yang telah mempermudah penulis dalam menyusun skripsi selama di Yogya dan Batam.
9. Para *Tan zu*, Ayi-ayi, Shu-shu, Pengabdi, koko khususnya ko Hengkie, cici khususnya Hui ren.fy, Adek-adek2 serta segenap keluarga besar Vihara Bodhicitta Maitreya, Vihara Maitreya Muni Solo dan Pusdiklat Sukhawati Maitreya.
10. A lang, Dewi, Eka, Ervi, Maya, Yali Aki et Charles Jufen Robi seluruh teman2 seperjuangan ku angkatan 2005.
11. Seluruh staf Perpustakaan dan staf Tata Usaha UAJY.
12. Seluruh teman-teman kos di Merpati 11 Demangan Baru, Mba Nam dan Pak Wakijan serta Tante selaku pemilik kos yang telah memberikan perhatian dan pemaafan selama 3,5 tahun.
13. Teman-Teman kuliah dan teman2 KKN Tematik Solo.
14. Ibu Maria dan seluruh *Student Volunteers* dan *Foreign Students* yang telah memberikan pengalaman hidup yang tiada habis dan menemani diakhir-akhir perjalanan kuliah.
15. *My God Father Aryo*, segenap *boss* yang telah memberikan pengalaman kerja selama penulis duduk di bangku kuliah.
16. Sayang ku “MioS dan Supra X CR” yang telah menemani dan mendukung mobitas sehingga penulis dapat menimba pengalaman yang bergitu banyak di kota Yogyakarta.

Semoga penelitian ini dapat menambah sedikit wawasan di bidang perpajakan khususnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di pulau Batam kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Sri Ayu Dharmawati

ABSTRACT

Located Batam is in the international trade rail. The strategic located made Batam get special treat in taxation especially in value added tax and luxurious goods sell tax. It begin from Batam as Pertamina Particular Oil place then the status change into Batam bonded zone. In 1980 Batam was bonded zone. This extraordinary treat made Batam was free of imposition of value added tax and luxurious goods sell tax for production of goods which is arranged on PP Nomor 63 Tahun 2003. In 2007 Batam change the status into free trade zone which is arranged on UU Nomor 44 Tahun 2007 jo PP Nomor 46 Tahun 2007. The extraordinary of free trade status is Batam which will be free of imposition of value added and luxurious goods sell tax, both for production of goods and consumption of goods. The research use normative methodology which it will be analyzed by qualitative. The conclusion of this research is in the performance, Batam is still imposed value added tax and luxurious goods sell tax for consumption of goods. Even though PP Nomor 63 Tahun 2003 is imposed until now, there is no bad effect for businessman. But it will deviate the principle of Lex Superior Derogate Legi Inferior . If free trade zone in Batam want to compete with the other countries that also have free trade zone, Indonesian government should be more professional when plan a regulation.

Keywords : tax, value added tax, free trade zone.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSERTUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisis.....	12
BAB II : PEMBAHASAN.....	15
A. Tinjauan Umum PPN dan PPnBM.....	15
1. Pengertian PPN dan PPnBM	15
2. Fungsi PPN dan PPnBM	17
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak	18
4. Obyek PPN dan PPnBM	19
5. Sifat PPN	23
6. Prinsip PPN	23
7. Jenis Barang Dan Jasa Yang Penyerahannya Tidak Kena PPN Dan PPnBM	23
8. Tarif PPN dan PPnBM.....	25
9. Dasar Pengenaan Pajak PPN dan PPnBM.....	25
B. Sinkronisasi Berlakunya PP Nomor 63 Tahun 2003 Terhadap UU Nomor 44 Tahun 2007.....	26
1. Pengertian Kawasan Berikat Dan Kawasan Perdagangan Bebas	26

2. Fungsi dan Prinsip Kawasan Berikat Dan Kawasan Perdagangan Bebas	29
3. Manfaat Kawasan Berikat Dan Kawasan Perdagangan Bebas.....	30
4. Penyelenggaraan Kawasan Berikat.....	31
5. Pertentangan Antara PP Nomor 63 Tahun 2003 Dengan UU Nomor 44 Tahun 2007	31
C. Implikasi Ketidak Sinkronan PP Nomor 63 Tahun 2003 Dengan UU Nomor 44 Tahun 2007 Terhadap Pengenaan PPN dan PPNBM Di Pulau Batam	52
BAB III : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR TABEL.....	xii
LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rekapitulasi Rencana Penanaman Modal Asing di Pulau Batam Tahun 2000- Desember 2006

Tabel 2 : Rekapitulasi Realiasi Penanaman Modal Asing Di Pulau Batam Tahun 2000 – Desember 2007

Tabel 3 : Perkembangan Expor Di Pulau Batam Tahun 2003-2007

Tabel 4 : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Batam

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Perencanaan Daerah)
2. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat)
3. Surat Pelaksanaan Wawancara Riset dari Pemerintah Kota Batam (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral)
4. Surat Keterangan dari Kamar Dagang Dan Industri Kota Batam
5. Surat Pelaksanaan Riset dari Otorita Batam
6. Surat Izin Riset dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2008

Yang menyatakan,

Sri Ayu Dharmawati